

Mengawal Perdamaian Dari Bawah Belajar Dari Peran Tokoh Agama dan Adat

Membincang seputar maraknya konflik berbasis agama dan adat, Jurnal Tashwirul Afkar mengadakan *Roundtable Discussion* dengan tema *Membangun Perdamaian dalam Bingkai Agama dan Adat*. Diskusi ini melibatkan sejumlah tokoh, akademisi, peneliti, yaitu: E. Shobirin Nj. (Tashwirul Afkar), Toni Pangu (PP. Lakpesdam NU), Lilis Nurul Husna (PP. Lakpesdam NU), Ahmad Suaedy (The Wahid Institute), Abd. Moqsith Ghazali (Repro), Imdadun Rahmat (Paras Foundation), Ala'i Najib (PP Lakpesdam NU), Ahmad Nurcholish (ICRP), Irine Hiraswari Gayatri (LIPI/Interseksi), Mujtaba Hamdi (Desantara Institute), A. Malik (AMAN Indonesia), Syaiful Arif (Pesantren Ciganjur), Dea Dahlia (AMAN Indonesia), Khamami Zada (Tashwirul Afkar), A. Fawaid Sjadzili (Tashwirul Afkar), Hamzah Sahal (Tashwirul Afkar), Ufi Ulfiah (Tashwirul Afkar),

Tulisan berikut merupakan hasil *Roundtable Discussion* pada 19 April 2007 di Kantor PP Lakpesdam NU yang diolah oleh Ufi Ulfiah

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan kelompok memiliki potensi yang besar terjadinya konflik, baik yang dilatarbelakangi oleh persoalan agama maupun persoalan budaya dan etnik. Ini terbukti dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, seperti penyerangan terhadap Ahmadiyah, penutupan gereja, penyerangan terhadap aliran sesat dan budaya yang dianggap bertentangan dengan agama. Kekerasan atas nama agama dan budaya ini telah menjadi realitas empirik dalam satu dekade terakhir ini.

Kekerasan atas nama agama dan budaya merupakan fenomena sosial yang

sedang terjadi dalam suatu komunitas bangsa yang sedang mencari jati diri hubungan-hubungan sosial antar individu di dalam masyarakat, baik sesama agama tetapi berbeda paham, maupun berbeda agama dan kebudayaan. Ketika hubungan-hubungan itu tidak berjalan baik, maka yang terjadi adalah kekerasan demi kekerasan dengan dalih menegakkan agama yang benar atau paham agama yang dianggap benar. Tak heran jika yang terjadi adalah kekerasan demi kekerasan di masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang selama ini dikenal toleran seakan tidak mampu menghilangkan sikap-sikap intoleran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok



dok.lalpesdam

yang menginginkan unifikasi pandangan keagamaan dan keberagaman. Toleransi telah digantikan oleh aksi kekerasan demi memperjuangkan kebenaran yang diyakini, meskipun kebenarannya masih bersifat relatif, tidak absolut. Memperjuangkan kebenaran yang relatif itulah yang dianggap sebagai perjuangan membela agama yang benar.

Kecenderungan menghilangnya toleransi ini dapat dilihat dari tiga hal. *Pertama*, hilangnya sikap-sikap toleran di kalangan sesama pemeluk agama. Misalnya saja di kalangan sesama umat Islam tidak terjadi hubungan yang dialogis dan harmonis. Justru yang terlihat adalah adanya kecenderungan untuk memak-

sakan kebenaran agama yang diyakininya dengan cara-cara kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bentuk penyikapan terhadap kelompok-kelompok yang memiliki pandangan keagamaan berbeda yang kemudian dicap sebagai "sesat". Kecenderungan yang pertama ini terlihat dari kasus yang menimpa Yusman Roy di Malang, Jemaat Ahmadiyah di berbagai daerah, Lia Eden di Jakarta, Pondok Nabi di Bandung, Ardhi Hussein (Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) di Probolinggo, Jawa Timur dan kelompok yang dituding sebagai aliran sesat lainnya. Dalam praktiknya, mereka mendapatkan kekerasan oleh kelompok mainstream dalam bentuk

penyerangan, pembakaran, pengrusakan tempat ibadah, pengusiran jamaah, dan bahkan dijatuhi sanksi hukum oleh pengadilan.

Kedua, hilangnya toleransi di kalangan antar umat beragama. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus konflik antaragama yang terjadi di Ambon dan Poso, penutupan gereja di beberapa daerah dengan dalih gereja-gereja yang ditutup adalah gereja yang ilegal (tempat tinggal/ruko dijadikan sebagai tempat ibadah). Dan barangkali dalam konteks yang lain juga, hilangnya toleransi dapat kita lihat dari sulitnya pendirian masjid-masjid di daerah yang mayoritas non-muslim. Sikap-sikap inilah yang telah menghancurkan bangunan toleransi di dalam kehidupan masyarakat yang meje-muk. Persoalan pelik yang sejak dulu sulit dihilangkan di antara umat Islam dan Kristen di Indonesia adalah membangun hubungan yang harmonis. Karena hampir selalu terjadi konflik antar agama di Indonesia yang melibatkan dua komunitas agama ini.

Ketiga, hilangnya toleransi dapat juga kita lihat dari sikap-sikap permusuhan antar etnis, seperti yang pernah terjadi di Sambas, Kalimantan Selatan, dan Sampit, Kalimantan Tengah, Kerusuhan antar suku di Mimika, Papua. Juga tampak sikap permusuhan kelompok-kelompok agama terhadap adat dan kebudayaan masyarakat, terutama masyarakat adat yang terpinggirkan. Lebih parah lagi, terhadap masyarakat adat yang sudah tercampur dengan agama. Mereka sering disebut sebagai agama sinkretik, tahayul, dan telah

keluar dari jalan agama yang benar. Meskipun benturannya dengan 'agama resmi' tidak begitu serius, tetapi sikap kelompok agama resmi cenderung tidak toleran dan cenderung memusuhi.

Hilangnya toleransi dalam masyarakat agama dan adat tentu saja mengancam *peace building*. Konflik adalah kenyataan hidup. Biasanya, konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Tetapi konflik yang melibatkan agama atau kebudayaan biasanya dengan mudah disulut dengan kekerasan. Faktor agama dan budaya (adat) seringkali menjadi sumbu penyulut konflik yang berakhir pada kekerasan.

Identitas Hibrid

Konflik yang terjadi di tanah air tidak luput dari isu-isu agama dan etnik. Balutan isu agama dan etnik ini memang begitu mudah memancing emosi massa. Apa yang disebut perang identitas ini sangat mudah menyangkutpautkan identitas agama dan etnik. Padahal, identitas itu tidak tunggal, tapi campur-aduk, dan hibrid.

Hibriditas identitas inilah yang mengantarkan orang untuk mencari-cari pemicu dengan mencari keterkaitan identitas mana yang paling pantas untuk ditarik dan paling efektif membangkitkan emosi massa. Pengusiran Ahmadiyah di Lombok misalnya dapat dijadikan contoh karena *pertama*, secara teologis mereka berbeda dengan keyakinan Islam mainstream. *Kedua*, secara kultural, mayoritas penganut Ahmadiyah adalah pendatang dari luar Lombok. Identitas-identitas itu

kemudian diangkat ke permukaan, dan kemudian dihakimi. Lalu lahirlah konflik.

Fenomena yang muncul di Bali adalah ketegangan baru antara kelompok Hindu yang mayoritas dan Islam yang minoritas. Fenomena apa yang disebut dengan “Baso Bali”, pada mulanya hanyalah istilah bagi label dan keaslian produk. Persis dengan Pek-Empek Palembang, Mangga Probolinggo, Durian Montong, dll. Namun, label Bali pada baso di Bali berdampak lain. Karena, baso Bali adalah baso yang di buat oleh orang Bali yang diolah dari daging babi dan diproduksi untuk menyaingi “baso Jawa” (dibuat oleh dan berasal dari Jawa dan secara religius beragama Islam). Baso Jawa adalah baso yang “mainstream.” Lebelisasi Bali di belakang baso produksi orang Bali bukan semata-mata ingin menunjukkan agar kesan Bali lebih terasa pada baso. Artinya, ketika orang ke Bali dan makan baso Bali akan terasa sangat Bali. Tetapi lebih ditunjukkan untuk menyaingi keberadaan baso mainstream (Jawa). Penggunaan Babi sebagai bahan dasar basolah yang menjadi kemelut. Menurut masyarakat Muslim, hal itu akan menjebak konsumen terutama pembeli Muslim.

Akan tetapi, baso Bali yang dibuat dari daging Babi memiliki fenomena lain. Babi adalah daging yang diharamkan oleh ajaran Islam. Dalam fenomena baso Bali bukan terdapat pada soal asal suatu produk, tapi berkembang pada soal identitas yang terganggu. Dalam hal ini, bukan semata-mata Jawa atau Bali, tapi lebih pada soal agama. Secara langsung atau tidak, pengusaha yang membiayai

produksi baso Bali secara sengaja mempermainkan identitas ke-Bali-an yang dalam hal ini menyangkut penganut mayoritas Bali yang Hindu, untuk tujuan ekonomisnya. Dan sentimen agama digunakan untuk mendepak usaha lain dan menguasai aspek ekonomi masyarakat. Terlebih etnik Jawa adalah pendatang di Bali. Artinya, logika kapitalistik telah meruntuhkan bangunan kerukunan yang selama ini berdiri di Bali.

Dalam hal ini, ekonomi menjadi motif yang dominan. Fenomena lain yang berkenaan dengan motif ekonomi yang berkorelasi dengan relasi sosial keagamaan muncul di Karawang. Terdapat pekuburan bebas, di mana setiap orang yang meninggal bisa dikubur secara berdampingan, tidak dilihat asal-usul identitas keagamaannya, baik Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dll. Tidak seperti kuburan lain yang banyak menggunakan identitas keagamaan seperti kuburan Islam, kuburan Kristen, dll, kuburan di Karawang ini tidak menyekat orang yang hendak dikubur di komplek pekuburan tersebut. Asalkan mampu membayar biaya penguburan yang relatif sangat mahal itu, maka orang yang meninggal akan mendapat kuburan yang relatif bagus.

Dalam hal ini, kebebasan, ruang keterbukaan, dan toleransi di satu sisi, dan ketegangan maupun konflik di sisi yang lain, sangat terkait dengan siapa yang hendak mengupayakannya. Masing-masing memiliki kepentingan ke arah mana suasana hendak diciptakan, damai dan toleran atau ketegangan dan konflik. Lalu bagaimana damai diprakarsai?

Inisiatif Perdamaian Dari Bawah

Di sinilah agama sebagai suatu identitas harus dilihat kembali. Selama ini terjadi perebutan makna identitas. Dalam usaha memprakarsai perdamaian, pencarian makna identitas menjadi hal yang amat penting, untuk mengetahui sejauh mana identitas dimaknai dan seberapa besar pemaknaan itu berpengaruh dalam hubungannya dengan relasi sosial. Artinya, kalau identitas itu dimaknai oleh individu maka indikator perdamaian bisa digagas mulai atau berangkat dari level ini. Bagaimana penganut agama memberikan pemaknaan terhadap agama lain atau kepercayaan lain. Misalnya, bagaimana orang Lombok memaknai Islam sebagai agamanya, atau bagaimana orang Bali memaknai agama Hindu. Jika pemaknaan ini sudah diketahui, maka akan diketahui pula problem apa yang menjadi kendala penganut agama bisa lebih toleran atau tidak. Jika ternyata agama menjadi pemicu terhadap sikap-sikap intoleran, maka pada level ini upaya memprakarsai damai bisa dirumuskan. Yaitu dengan memproduksi dan mensosialisasikan pemahaman keberagaman yang lebih toleran, terbuka dan humanis. Dalam konteks NU, fiqh bisa diupayakan sebagai alat ucap kultural guna mengkampanyekan pemahaman agama yang lebih terbuka, toleran, humanis. Dengan demikian harus diupayakan fiqh yang memiliki prespektif toleran, humanis terlebih dahulu.

Sebaliknya, kalau pemaknaan identitas itu milik kelompok, maka harus dilihat siapa yang memegang. Kelompok mana yang paling berpengaruh terhadap pe-

maknaan identitas itu. Apakah itu tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat atau negara. Siapa dan bagaimana pengusaha di Bali mempengaruhi masyarakat, siapa berada di belakang aksi pengrusakan dan kekerasan terhadap kelompok minoritas baik Muslim maupun non Muslim. Misalnya, bagaimana NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, FPI, HTI dll menggunakan agama dalam hubungannya dalam relasi sosial. Jika ini sudah dapat dilihat, maka akan terlihat bagaimana identitas itu digunakan. Apakah menjadi alat yang mendorong perdamaian atau konflik.

Dalam ranah yang berbeda, inisiatif para pimpinan agama dalam mengupayakan perdamaian dalam berbagai bentuk kegiatan sejak penggarapan dakwah agama hingga penyelesaian konflik menjadi sangat penting. Karena para pemimpin agama inilah yang biasanya memiliki pengaruh strategis dalam penyelesaian konflik.

Pada ranah ini agama seharusnya dipandang sebagai sistem kebudayaan sebagaimana halnya adat. Mengingat agama adalah praktik keseharian. Dengan demikian, prakarsa damai itu sendiri bisa berangkat dari keseharian. Perangkatnya bisa berasal dari kearifan lokal. Misalnya mengadopsi kearifan masyarakat adat yang mempunyai prakarsa damai yang berusia ratusan tahun.

Sebagai negara yang multikultural, Indonesia memiliki sejarah pola hidup berdampingan sejak ribuan tahun yang lalu. Kelompok-kelompok masyarakat memiliki ajaran-ajaran kebijaksanaan

yang dapat digunakan sebagai resep meneguhkan semangat perdamaian. Dalam masyarakat Maluku dikenal "Pela Gadong", yaitu ajaran leluhur yang memuliakan dan mengedepankan kebersamaan, atau 'upacara perdamaian' yang diselenggarakan setiap tahun oleh masyarakat Pulau Ketapang, Kalimantan Barat, sebagai medium kultural mencegah konflik.

Ini merupakan usaha mengeleminir kecenderungan pendekatan yang menggunakan narasi besar dalam memandang konflik. Karena konflik di Indonesia banyak direduksi menjadi persoalan politik semata. Oleh karena itu, rekonsiliasi yang menggunakan statmen politik akan menghasilkan rekonsiliasi politis yang cenderung *psudeo* atau status quo.

Di pihak lain, pemerintah sebagai elemen yang paling bertanggung jawab dalam kehidupan warga pun memiliki peran serupa dalam memprakarsai perdamaian. Intervensi negara terhadap upaya perdamaian tentu saja bukan sesuatu yang negatif. Akan tetapi, jika hanya negara yang menjadi garda depan yang selalu mengupayakan perdamaian hanya akan

membuat masyarakat mengandalkan negara. Artinya, dalam tubuh masyarakat sendiri tidak memiliki inisiatif untuk mengupayakan perdamaian.

Faktanya, di sejumlah wilayah yang terlibat konflik, peran warga demikian besar dalam memprakarsai perdamaian. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa warga tidak menghendaki konflik. Kalaupun terjadi konflik, itu lebih karena 'hembusan' dari luar. Multifaktor sebagaimana diurai di atas itulah yang mengganggu kenyamanan warga yang selalu mengandalkan perdamaian.

Pada ranah inilah jejaring relasi kuasa yang memicu konflik akan terlihat dan mudah memetakan konflik yang terjadi. Karena sentimen identitas (agama, ras, etnik dll) yang berjaln kelindan dengan relasi kuasa adalah fakta riil konflik yang banyak terjadi. Bahwa ada sistem dominasi, ada kelompok yang mendiskriminasi dan terdiskriminasi. Tesis ini sangat menjelaskan berbagai konflik yang terjadi di Indonesia, bahwa persoalan mayoritas dan minoritas merupakan salah satu persoalan dari relasi kuasa itu sendiri. ❖